ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.11, Oktober 2026

Implementasi Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi di Sekolah Dasar: Studi Deskriptif pada Tiga Lembaga Pendidikan Dasar di Bali dan Papua Selatan

Ni Putu Wangi Apriliani[1], Ni Putu Rosarini Putri[2], Adris Paulina A. Kause[3], Ni Wayan Rati[4]
[1,2,3,4]Program Studi Pendidikan Dasar, Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha
E-mail: wangi.apriliani@student.undiksha.ac.id[1]

Article History:
Received: 01 Oktober 2026
Revised: 10 Oktober 2026
Accepted: 12 Oktober 2026

Keywords: *standar kompetensi lulusan; standar isi; standar nasional pendidikan; kurikulum merdeka; sekolah dasar*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) sebagai dua komponen Standar Nasional Pendidikan pada jenjang sekolah dasar. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan melibatkan tiga sekolah dasar yang memiliki karakteristik geografis dan sosial berbeda, yaitu SD Negeri 1 Semarapura Tengah dan SD Negeri 2 Menanga di Provinsi Bali, serta SD YPPK Santa Theresia Buti di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Data dihimpun melalui observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen perangkat pembelajaran, lalu dianalisis secara deskriptif menggunakan lembar observasi terstruktur dengan skala lima poin. Hasil kajian memperlihatkan bahwa ketiga sekolah secara konsisten merujuk pada regulasi nasional dalam menyusun dokumen kurikulum, meskipun kedalaman dan kematangan implementasinya berbeda-beda sesuai konteks lokal serta tahap transisi kurikulum yang sedang dijalani. SD Negeri 2 Menanga tampak paling progresif karena telah mengintegrasikan pendekatan pembelajaran mendalam dan delapan dimensi profil lulusan ke dalam budaya sekolah, sementara SD YPPK Santa Theresia Buti masih berada pada masa transisi dari Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka dengan tetap mempertahankan muatan lokal Papua. Tantangan utama yang teridentifikasi meliputi pemahaman guru terhadap Capaian Pembelajaran dan Alur Tujuan Pembelajaran, keterbatasan sarana penunjang, serta konsistensi pembiasaan karakter peserta didik. Kajian ini merekomendasikan penguatan pelatihan dan pendampingan guru secara berkelanjutan serta pemerataan sarana prasarana agar implementasi SKL dan SI dapat berlangsung optimal di berbagai wilayah Indonesia.*

PENDAHULUAN

Keberhasilan kebijakan standar pendidikan bergantung pada bagaimana sekolah menerjemahkan kompetensi yang diharapkan ke dalam materi, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Hubungan tersebut menjadi penting karena rumusan kompetensi pada tingkat kebijakan memerlukan keputusan pedagogis yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam kajian pengembangan kurikulum, Priestley et al. (2012) menunjukkan bahwa kemampuan guru untuk menjalankan perubahan dibentuk oleh interaksi antara keyakinan profesional, pengalaman, serta kondisi kelembagaan yang memungkinkan atau membatasi tindakan mereka. Dengan demikian, penerapan standar pendidikan perlu dipahami sebagai proses penafsiran dan pengambilan keputusan di tingkat sekolah, yang keberhasilannya tidak cukup dinilai melalui keberadaan dokumen kurikulum.

Persoalan tersebut berkaitan dengan keselarasan antara tujuan pendidikan dan pengalaman belajar peserta didik. Konsep *constructive alignment* yang dikembangkan Biggs (1996) menekankan keterhubungan antara hasil belajar yang diharapkan, aktivitas pembelajaran, dan penilaian. Meskipun mula-mula dirumuskan dalam konteks pendidikan tinggi, prinsip keselarasan tersebut dapat diadaptasi sebagai sudut pandang untuk menelaah hubungan antarkomponen pembelajaran di sekolah dasar. Melalui sudut pandang ini, kesesuaian perangkat pembelajaran diperiksa berdasarkan kejelasan hubungan antara kompetensi yang dituju, materi yang dipilih, kegiatan yang dirancang, serta bukti belajar yang digunakan untuk menilai pencapaiannya.

Dalam konteks Indonesia, hubungan antarkomponen tersebut memperoleh landasan melalui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kerangka pengembangan kurikulum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (SI), Standar Proses, dan Standar Penilaian sebagai acuan yang saling berkaitan (Pemerintah Republik Indonesia, 2021, 2022). SKL memberikan arah mengenai kompetensi yang diharapkan pada akhir jenjang pendidikan, sedangkan SI menentukan ruang lingkup materi untuk mendukung pencapaiannya. Hubungan ini menempatkan SKL dan SI sebagai dasar untuk menelaah konsistensi antara arah kebijakan pendidikan dan rancangan pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan.

Perkembangan kebijakan turut menuntut penyesuaian acuan dalam mengevaluasi penerapan kedua standar tersebut. Ketentuan SKL diperbarui melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025, yang mencabut Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022. Sementara itu, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 menetapkan SI sebagai kriteria minimal mengenai ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2025a, 2025b). Pembaruan tersebut memperkuat kebutuhan untuk memeriksa bagaimana sekolah memahami dan menerjemahkan standar ke dalam dokumen maupun praktik pembelajaran. Dalam penelitian ini, regulasi yang digunakan sebagai tolok ukur perlu disesuaikan dengan periode penyusunan dokumen dan pelaksanaan pembelajaran yang diteliti.

Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa penerapan standar dan perubahan kurikulum berkaitan erat dengan kesiapan pelaksana serta dukungan lingkungan sekolah. Melalui studi literatur mengenai Kurikulum Merdeka di sekolah dasar, Firdaus dan Permana (2024) mengidentifikasi peluang penguatan pembelajaran melalui program pengembangan guru, sekolah penggerak, dan pembentukan profil pelajar Pancasila. Namun, mereka juga menemukan persoalan pada pemahaman guru terhadap karakteristik kurikulum dan ketersediaan fasilitas pendukung. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan kurikulum memerlukan dukungan terhadap kemampuan guru dalam memahami arah kebijakan dan mengembangkannya menjadi

pembelajaran yang dapat dilaksanakan di kelas.

Pada tingkat satuan pendidikan, Mufidah et al. (2025) memberikan gambaran mengenai peran kerja sama dalam penerapan SI di SD Negeri Pucung IV. Studi kasus tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan SI didukung oleh koordinasi dengan pengawas sekolah serta kolaborasi melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah dan Kelompok Kerja Guru. Perbedaan karakter dan kemampuan akademik peserta didik juga menuntut penggunaan strategi pembelajaran yang adaptif. Jika dibaca bersama kajian Firdaus dan Permana (2024), temuan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan standar berlangsung melalui hubungan antara pemahaman guru, dukungan kelembagaan, dan penyesuaian pembelajaran terhadap kondisi peserta didik.

Meskipun memberikan penjelasan mengenai kesiapan dan dukungan implementasi, kedua kajian tersebut belum secara khusus menempatkan keterlacakan hubungan antara SKL, SI, dokumen perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian sebagai pusat analisis. Aspek ini penting karena kesesuaian dokumen dengan ketentuan standar belum dengan sendirinya menjelaskan konsistensi penerapannya dalam pembelajaran. Sebaliknya, penyesuaian kegiatan di kelas juga perlu ditelaah berdasarkan kontribusinya terhadap kompetensi yang dituju. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang menghubungkan penelaahan dokumen dengan pemahaman guru dan kepala sekolah serta praktik pembelajaran dan penilaian, sehingga kesesuaian antarkomponen tersebut dapat dijelaskan secara lebih utuh.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan SKL dan SI di sekolah dasar dengan menelaah hubungan antara pemahaman pelaksana, dokumen perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian. Penelitian diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan: bagaimana guru dan kepala sekolah memahami hubungan SKL dan SI; bagaimana pemahaman tersebut diterjemahkan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran; serta bagaimana penilaian dirancang dan digunakan untuk memperoleh bukti pencapaian kompetensi yang mengarah pada SKL. Kontribusi penelitian terletak pada penjelasan mengenai bagian-bagian yang telah selaras maupun yang masih terputus dalam penerapan standar di tingkat sekolah. Temuannya diharapkan menjadi dasar bagi penyempurnaan perangkat pembelajaran, pendampingan guru, dan evaluasi kurikulum satuan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif (*multiple-case study*) untuk menganalisis implementasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) pada tiga sekolah dasar yang memiliki karakteristik kelembagaan, kurikulum, dan sosial-budaya berbeda. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami praktik pendidikan dalam konteks alamiahnya dengan memperhatikan pengalaman pelaksana, proses penerapan kebijakan, serta kondisi kelembagaan yang memengaruhi implementasinya (Creswell & Poth, 2024). Desain studi kasus komparatif digunakan karena penelitian tidak hanya menggambarkan pelaksanaan standar pendidikan pada masing-masing sekolah, tetapi juga mengidentifikasi persamaan dan perbedaan praktik implementasi antarsekolah berdasarkan konteksnya (Yin, 2018).

Lokasi penelitian mencakup tiga sekolah dasar dengan karakteristik kontras, yaitu SD Negeri 1 Semarapura Tengah di Kabupaten Klungkung, SD Negeri 2 Menanga di Kabupaten Karangasem, keduanya di Provinsi Bali, serta SD YPPK Santa Theresia Buti di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Pemilihan ketiga lokasi didasarkan pada pertimbangan keragaman status sekolah, tahap transisi kurikulum, serta konteks sosial-budaya yang berbeda. Strategi pemilihan kasus berdasarkan variasi karakteristik memungkinkan penelitian memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana kebijakan pendidikan diterapkan dalam kondisi kelembagaan yang

berbeda (Yin, 2018). Karakteristik ketiga sekolah disajikan pada Tabel 1. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah sebagai penanggung jawab kebijakan, guru kelas dan guru mata pelajaran sebagai pelaksana pembelajaran, peserta didik sebagai pihak yang mengalami proses pencapaian kompetensi lulusan, serta tenaga kependidikan dan komite sekolah sebagai unsur pendukung implementasi kebijakan pendidikan.

Tabel 1. Profil Tiga Sekolah Dasar yang Menjadi Lokasi Penelitian

Aspek	SDN 1 Semarapura Tengah	SDN 2 Menanga	SD YPPK St. Theresia Buti
Lokasi	Klungkung, Bali	Karangasem, Bali	Merauke, Papua Selatan
Status / Akreditasi	Negeri / A	Negeri	Swasta / B
Tahun Berdiri	1912	1974	1924
Jumlah Siswa	± 600	Tidak disebutkan rinci	362
Jumlah Guru	± 30	Tidak disebutkan rinci	15
Kurikulum yang Digunakan	Kurikulum Merdeka (transisi dari K-13)	Kurikulum Merdeka + Pembelajaran Mendalam (sejak 2025)	Kurikulum 2013, transisi ke Kurikulum Merdeka

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati proses pembelajaran, interaksi guru dan peserta didik, serta penerapan standar pendidikan dalam kegiatan pembelajaran. Wawancara dilakukan terhadap kepala sekolah dan guru menggunakan pedoman pertanyaan untuk menggali pemahaman, strategi pelaksanaan, kendala, serta upaya penyelesaian masalah dalam implementasi SKL dan SI. Studi dokumentasi mencakup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), modul ajar, dan dokumen kurikulum operasional sekolah untuk mengidentifikasi kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dan ketentuan standar pendidikan. Penggunaan berbagai sumber data tersebut mengikuti prinsip pengumpulan bukti dalam penelitian studi kasus yang menekankan pentingnya memperoleh pemahaman menyeluruh melalui sumber informasi yang saling melengkapi (Yin, 2018).

Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui pengorganisasian, pemilahan, penyajian, dan interpretasi temuan yang diperoleh dari ketiga sekolah. Proses analisis diarahkan untuk mengidentifikasi pola implementasi SKL dan SI, menguraikan faktor pendukung dan penghambat, serta membandingkan kesesuaian praktik pendidikan berdasarkan karakteristik masing-masing sekolah. Pendekatan ini mengacu pada Miles et al. (2020), yang menekankan pentingnya kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan dalam analisis kualitatif. Sebagai instrumen pendukung, penelitian menggunakan lembar observasi terstandar yang mencakup empat aspek, yaitu perencanaan berbasis SKL, implementasi SKL dalam proses pembelajaran, evaluasi dan penjaminan mutu SKL, serta profil lulusan. Setiap aspek dinilai menggunakan skala satu hingga lima. Skor rata-rata dikategorikan ke dalam empat tingkat kesesuaian, yaitu sangat sesuai standar nasional (4,1–5,0), sesuai (3,1–4,0), cukup sesuai (2,1–3,0), dan belum sesuai (1,0–2,0). Hasil penilaian digunakan sebagai informasi deskriptif pendukung dan diinterpretasikan bersama temuan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Kredibilitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data dengan membandingkan konsistensi informasi dari berbagai sumber (Nowell et al., 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Standar Kompetensi Lulusan

Hasil observasi dan wawancara di ketiga sekolah memperlihatkan bahwa implementasi SKL telah merujuk pada regulasi nasional, meskipun kedalaman pelaksanaannya berbeda sesuai konteks masing-masing satuan pendidikan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2. Secara normatif, Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal kompetensi peserta didik yang mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025. Perbedaan penerapan standar tersebut dapat dipahami melalui perspektif implementasi kebijakan pendidikan yang menempatkan kapasitas kelembagaan, keterlibatan pelaksana, dan kondisi lokal sebagai faktor penting dalam penerjemahan kebijakan ke dalam praktik pendidikan (Viennet & Pont, 2017).

Tabel 2. Karakteristik Implementasi Standar Kompetensi Lulusan pada Tiga Sekolah

Sekolah	Karakteristik Implementasi SKL
SDN 1 Semarapura Tengah	SKL terdokumentasi dalam Kurikulum Operasional Sekolah dan telah diturunkan ke CP, TP, dan ATP; asesmen formatif-sumatif diterapkan, namun sistem monitoring capaian lulusan dan pelibatan orang tua masih bersifat informal.
SDN 2 Menanga	SKL dijabarkan melalui delapan dimensi profil lulusan (keimanan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi) yang diintegrasikan ke kurikulum intrakurikuler dan budaya sekolah berbasis falsafah Tri Hita Karana.
SD YPPK St. Theresia Buti	Kelulusan ditentukan melalui penyelesaian pembelajaran kelas I-VI, pencapaian kompetensi inti mata pelajaran wajib, serta penilaian akhir tahun dan ujian sekolah sesuai SKL Kurikulum 2013.

Di SD Negeri 1 Semarapura Tengah, dokumen SKL telah disusun dalam Kurikulum Operasional Sekolah dan disosialisasikan kepada dewan guru, kemudian diturunkan ke dalam Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP). Proses pembelajaran telah mencakup pengembangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui tiga jenis asesmen, yakni formatif awal, formatif, dan sumatif, dengan instrumen yang bervariasi mulai dari jurnal sikap hingga proyek dan presentasi. Meskipun demikian, sekolah ini belum memiliki sistem monitoring capaian lulusan yang terstruktur di luar forum rapat dewan guru, dan pelibatan orang tua masih berlangsung secara informal melalui grup paguyuban kelas. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tersedianya perangkat perencanaan belum selalu diikuti oleh penguatan mekanisme evaluasi yang sistematis. Gouëdard et al. (2020) menjelaskan bahwa keberhasilan reformasi kurikulum membutuhkan kesinambungan antara perencanaan, keterlibatan pemangku kepentingan, dan strategi pelaksanaan yang dapat diterapkan secara konsisten pada tingkat sekolah.

SD Negeri 2 Menanga menunjukkan kematangan implementasi yang lebih tinggi dengan menjabarkan SKL ke dalam delapan dimensi profil lulusan, yaitu keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Dimensi-dimensi ini diintegrasikan baik melalui pembelajaran intrakurikuler berbasis pendekatan pembelajaran mendalam maupun melalui pembiasaan budaya sekolah yang berlandaskan filosofi Tri Hita Karana, seperti kegiatan sembahyang bersama, gotong royong, perawatan kebun sekolah, dan budaya 5S. Pola integrasi lintas mata pelajaran turut diterapkan, misalnya muatan Bahasa Indonesia diarahkan untuk mengembangkan komunikasi dan penalaran kritis, sementara muatan pendidikan jasmani diarahkan pada penguatan kesehatan dan kolaborasi. Integrasi tersebut sejalan

dengan pendekatan implementasi kurikulum yang memberikan ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan praktik pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan sosialnya (Gouëdard et al., 2020).

Sementara itu, SD YPPK Santa Theresia Buti masih menjalankan SKL berdasarkan kerangka Kurikulum 2013, dengan kriteria kelulusan yang mencakup penyelesaian pembelajaran kelas satu hingga enam, pencapaian kompetensi inti pada mata pelajaran wajib, kelulusan penilaian akhir tahun dan ujian sekolah, serta pemenuhan kriteria sikap mencakup karakter, kehadiran, dan perilaku. Karakteristik ini mencerminkan posisi sekolah yang berada pada tahap awal transisi menuju paradigma kurikulum baru, sembari tetap mempertahankan muatan lokal khas Papua dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Perbedaan tahapan implementasi tersebut sejalan dengan Viennet dan Pont (2017), yang menekankan bahwa perubahan kebijakan pendidikan berlangsung melalui proses multidirectional dan sangat dipengaruhi oleh konteks kelembagaan serta kesiapan pelaksana.

Implementasi Standar Isi

Penerapan Standar Isi di ketiga sekolah secara umum mengikuti struktur kurikulum nasional, dengan variasi pada muatan lokal dan tata kelola perangkat ajar sebagaimana disajikan pada Tabel 3. Standar Isi merupakan kriteria minimal ruang lingkup materi pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan kompetensi lulusan, muatan wajib, konsep keilmuan, serta karakteristik jalur dan jenjang pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025.

Tabel 3. Karakteristik Implementasi Standar Isi pada Tiga Sekolah

Sekolah	Karakteristik Implementasi Standar Isi
SDN 1 Semarapura Tengah	Struktur kurikulum mengikuti tiga fase (A, B, C) dengan tujuh mata pelajaran wajib, muatan pilihan Bahasa Inggris, dan muatan lokal Bahasa Bali; ATP dan modul ajar disusun melalui forum KKG.
SDN 2 Menanga	Struktur kurikulum serupa dengan tambahan pengaturan alokasi waktu (36 minggu efektif kelas I-V; 32 minggu kelas VI; 1 JP = 35 menit) yang merujuk pada Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025.
SD YPPK St. Theresia Buti	Muatan wajib nasional tetap dipertahankan dengan penyesuaian konteks lokal Papua (muatan Katolik dan bahasa daerah Marind); perangkat ajar masih bertumpu pada format RPP Kurikulum 2013.

SD Negeri 1 Semarapura Tengah dan SD Negeri 2 Menanga sama-sama menerapkan Kurikulum Merdeka dengan tujuh mata pelajaran wajib, mata pelajaran pilihan Bahasa Inggris, serta muatan lokal Bahasa Bali. Penyusunan Alur Tujuan Pembelajaran dan modul ajar di kedua sekolah dilakukan secara kolaboratif melalui forum Kelompok Kerja Guru (KKG) dan rapat internal antarwali kelas, sehingga perangkat ajar lebih disesuaikan dengan karakteristik rombongan belajar masing-masing. Praktik kolaboratif tersebut relevan dengan temuan Al Arsyadhi et al. (2024) yang menunjukkan bahwa kesiapan guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka berkaitan dengan pemahaman konsep kurikulum, kemampuan merancang pembelajaran, dan dukungan sekolah. SD Negeri 2 Menanga melengkapi penerapan SI dengan pengaturan alokasi waktu yang lebih rinci, yaitu 36 minggu efektif untuk kelas I–V dan 32 minggu efektif untuk kelas VI, dengan satu jam pelajaran setara 35 menit, merujuk pada Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025.

Berbeda dengan dua sekolah di Bali, SD YPPK Santa Theresia Buti mempertahankan muatan wajib nasional sembari mengintegrasikan konteks lokal Papua, seperti muatan pendidikan Katolik dan bahasa daerah Marind, tanpa mengurangi substansi inti mata pelajaran. Perangkat pembelajaran di

sekolah ini masih mengacu pada format RPP Kurikulum 2013 dengan kegiatan inti berupa pertanyaan pemantik, eksplorasi konsep, diskusi kelompok, dan produk sederhana, didukung media belajar aktif seperti alat peraga dan kit IPA, serta instrumen penilaian autentik berupa observasi sikap, rubrik proyek, dan jurnal siswa. Karakteristik tersebut memperlihatkan bahwa penerapan kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kondisi dan kapasitas sekolah. OECD (2020) menegaskan pentingnya penyesuaian kebijakan dengan lingkungan implementasi agar perubahan pendidikan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Kendala dan Solusi Implementasi

Meskipun ketiga sekolah telah menunjukkan komitmen dalam mengimplementasikan SKL dan SI, beberapa kendala umum masih ditemukan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 4. Permasalahan tersebut memiliki kesamaan dengan temuan penelitian Asmahasanah et al. (2023) mengenai kesulitan guru memahami terminologi dan perangkat Kurikulum Merdeka, serta penelitian Serani dan Hairida (2024) tentang keterbatasan keterampilan asesmen, pelatihan, dan infrastruktur pendukung.

Tabel 4. Kendala dan Solusi dalam Implementasi SKL dan SI

Aspek Kendala	Permasalahan yang Ditemukan	Upaya Penyelesaian
Pemahaman CP dan ATP	Sebagian guru belum sepenuhnya memahami penjabaran Capaian Pembelajaran ke dalam Alur Tujuan Pembelajaran; transisi dari KI-KD memerlukan adaptasi.	Workshop internal penyusunan ATP, supervisi akademik kepala sekolah, dan komunitas belajar antarguru.
Sarana dan Prasarana	Fasilitas teknologi belum merata, media pembelajaran untuk proyek terbatas, koleksi pustaka mini belum variatif.	Optimalisasi sumber belajar kontekstual, pendekatan unplugged, pengadaan bertahap melalui dana BOS dan komite.
Konsistensi Budaya Sekolah	Pembiasaan positif (5S, literasi pagi, piket) belum konsisten dijalankan seluruh siswa; pengaruh media digital terhadap perilaku.	Penguatan program kebiasaan karakter, keteladanan guru, pelibatan orang tua, dan literasi digital.

Kendala yang paling menonjol berkaitan dengan pemahaman guru terhadap penjabaran Capaian Pembelajaran ke dalam Alur Tujuan Pembelajaran, mengingat transisi dari pendekatan Kompetensi Inti–Kompetensi Dasar menuju Capaian Pembelajaran membutuhkan adaptasi yang tidak instan. Temuan tersebut sejalan dengan Asmahasanah et al. (2023), yang mengidentifikasi kesulitan guru dalam memahami istilah dan perangkat pembelajaran baru, serta Yulaehah dan Utami (2024), yang menemukan kendala dalam penyusunan modul ajar Kurikulum Merdeka. Keterbatasan sarana dan prasarana, terutama pada aspek teknologi dan media pembelajaran berbasis proyek, juga menjadi tantangan yang relatif konsisten ditemukan di ketiga lokasi penelitian, meskipun direspons dengan strategi kontekstual seperti pemanfaatan lingkungan sekitar dan pendekatan unplugged untuk literasi digital. Pada aspek pembiasaan karakter, konsistensi pelaksanaan rutinitas seperti 5S dan literasi pagi masih memerlukan penguatan melalui keteladanan guru dan pelibatan aktif orang tua. Secara lebih luas, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penyelarasan antara kesiapan guru, dukungan kelembagaan, dan strategi pelaksanaan kurikulum (Al Arsyadhi et al., 2024; Gouëdard et al., 2020).

Pembahasan

Temuan di atas memperlihatkan adanya keterkaitan antara tingkat kematangan implementasi SKL dan SI dengan kesiapan sumber daya, dukungan kebijakan internal sekolah, serta tahap

transisi kurikulum yang dijalani. SD Negeri 2 Menanga, yang telah mengadopsi pendekatan pembelajaran mendalam sejak tahun 2025, menunjukkan integrasi paling menyeluruh antara dimensi profil lulusan dengan praktik pembelajaran dan budaya sekolah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi standar pendidikan tidak semata bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kemampuan sekolah menerjemahkan kebijakan ke dalam perencanaan, pembelajaran, asesmen, dan pembiasaan yang sesuai dengan konteks kelembagaannya. Gouëdard et al. (2020) menjelaskan bahwa kesenjangan antara rancangan reformasi kurikulum dan pelaksanaannya dapat diperkecil melalui keterlibatan guru, penguatan kapasitas organisasi, serta strategi implementasi yang koheren. Dalam konteks penelitian ini, integrasi yang ditemukan di SD Negeri 2 Menanga menunjukkan bagaimana standar nasional dapat dioperasionalkan melalui budaya sekolah tanpa menghilangkan orientasi kompetensi yang ditetapkan secara nasional.

Sebaliknya, posisi SD YPPK Santa Theresia Buti yang masih bertumpu pada kerangka Kurikulum 2013 menggambarkan perbedaan kesiapan implementasi kurikulum dibandingkan kedua sekolah di Bali. Meskipun demikian, sekolah ini tetap mempertahankan relevansi pembelajaran melalui muatan lokal Papua, penggunaan perangkat pembelajaran yang tersedia, dan penilaian autentik. Temuan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa keterlambatan transisi kurikulum tidak dengan sendirinya menunjukkan ketiadaan praktik pembelajaran yang kontekstual. Viennet dan Pont (2017) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh desain kebijakan, keterlibatan pemangku kepentingan, kondisi lingkungan, dan strategi pelaksanaan. Sementara itu, SD Negeri 1 Semarapura Tengah menunjukkan praktik yang relatif mapan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, tetapi masih memerlukan penguatan sistem monitoring capaian lulusan dan pelibatan orang tua secara lebih terstruktur. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepatuhan administratif terhadap standar belum selalu diikuti oleh mekanisme penjaminan mutu yang berkesinambungan, sebagaimana pentingnya strategi implementasi dan evaluasi dalam perubahan pendidikan yang dibahas OECD (2020).

Secara keseluruhan, perbandingan ketiga sekolah menegaskan bahwa implementasi SKL dan SI di sekolah dasar berlangsung secara kontekstual dan bertahap. Perbedaan yang ditemukan bukan hanya terletak pada kurikulum yang digunakan, melainkan juga pada kemampuan sekolah menghubungkan standar nasional dengan kesiapan guru, perangkat pembelajaran, budaya sekolah, dan mekanisme penjaminan mutu. Temuan ini sejalan dengan kerangka implementasi kebijakan pendidikan Viennet dan Pont (2017), yang memandang pelaksanaan kebijakan sebagai proses perubahan multidimensional yang melibatkan interaksi antara regulasi, aktor, dan lingkungan institusional. Oleh karena itu, strategi penguatan SKL dan SI perlu mempertimbangkan keragaman kondisi kelembagaan, geografis, sosial-budaya, dan tahapan transisi kurikulum, sehingga peningkatan mutu pendidikan tidak berhenti pada keseragaman dokumen, tetapi tercermin dalam praktik pembelajaran dan capaian kompetensi peserta didik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap implementasi Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi di tiga sekolah dasar, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kedua standar tersebut telah berjalan secara sistematis dengan merujuk pada regulasi nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, serta Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024. Tingkat kematangan implementasi bervariasi sesuai konteks lokal, dengan SD Negeri 2 Menanga menunjukkan integrasi paling progresif melalui pendekatan pembelajaran mendalam, SD Negeri 1 Semarapura Tengah

menunjukkan kestabilan pada aspek perencanaan dan pelaksanaan, sementara SD YPPK Santa Theresia Buti masih berada pada tahap transisi dari Kurikulum 2013. Kendala yang ditemukan, terutama terkait pemahaman Capaian Pembelajaran, keterbatasan sarana, dan konsistensi pembiasaan karakter, telah direspons sekolah melalui berbagai upaya kontekstual, sehingga implementasi SKL dan SI secara umum dapat dikatakan berjalan terencana, terstruktur, dan berorientasi pada pengembangan peserta didik secara utuh sesuai tuntutan pendidikan abad ke-21.

DAFTAR REFERENSI

Al Arsyadhi, N. L., Dewi, L., & Hernawan, A. H. (2024). Evaluation of teacher readiness in implementing Kurikulum Merdeka in elementary schools. *Inovasi Kurikulum, 21*(2), 1149–1160. https://doi.org/10.17509/jik.v21i2.64113

Asmahasanah, S., Chairunnissa, I. C., & Hakim, N. (2023). Navigating Merdeka curriculum in first grade: Teacher challenges and strategies. *Journal of Integrated Elementary Education, 3*(2), 137–149. https://doi.org/10.21580/jieed.v3i2.17592

Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. *Higher Education, 32*(3), 347–364. https://doi.org/10.1007/BF00138871

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Firdaus, R., & Permana, J. (2024). Kelebihan dan kekurangan implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu, 8*(3), 1885–1897. https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i3.7570

Gouëdard, P., Pont, B., Hyttinen, S., & Huang, P. (2020). *Curriculum reform: A literature review to support effective implementation* (OECD Education Working Papers No. 239). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/efe8a48c-en

Hayatunnisa, I., Mufidah, N., Reza, R., Fauzi, M. A. F., & Permana, H. (2025). Penerapan standar isi pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Pucung IV. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10*(4), 254–265. https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.35266

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025a). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/321419

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025b). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/322494

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025c). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/322506

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods, 16*(1), 1–13. https://doi.org/10.1177/1609406917733847

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *An implementation framework*

for effective change in schools (OECD Education Policy Perspectives No. 9). https://doi.org/10.1787/4fd4113f-en

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/165024/pp-no-57-tahun-2021

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/196151/pp-no-4-tahun-2022

Priestley, M., Edwards, R., Priestley, A., & Miller, K. (2012). Teacher agency in curriculum making: Agents of change and spaces for manoeuvre. *Curriculum Inquiry, 42*(2), 191–214. https://doi.org/10.1111/j.1467-873X.2012.00588.x

Serani, G., & Hairida. (2024). Implementasi asesmen pembelajaran Kurikulum Merdeka: Kesulitan dan tantangan guru di sekolah dasar Kota Sintang. *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 15*(1), 79–90. https://doi.org/10.31932/ve.v15i1.3386

Viennet, R., & Pont, B. (2017). *Education policy implementation: A literature review and proposed framework* (OECD Education Working Papers No. 162). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/fc467a64-en

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

Yulaehah, S., & Utami, R. D. (2024). Analysis of the teacher's difficulties in the preparation of teaching modules Kurikulum Merdeka in elementary school. *Inovasi Kurikulum, 21*(1), 429–442. https://doi.org/10.17509/jik.v21i1.64464